

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sumatera Utara yakni salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini diawali dengan penyerahan wewenang atau tanggungjawab yang bersumber dari pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kebijakan otonomi daerah ini dilaksanakan dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 (lalu diganti menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014) mengenai pemerintahan daerah serta UU No. 25 Th. 1999 (lalu jadi UU No. 33 Tahun 2004)mengenai perimbangan keuangan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan pelayanan publik yang sebelumnya tertinggal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya dan mengantarkan masyarakat menuju keberhasilan atau dapat mensejahterahkan masyarakat melalui potensi dan kemampuan yang ada di masing-masing daerah. Karakteristik utamanya suatu daerah sebagai daerah otonom yakni keterampilan finansial daerah tersebut, yang dimana daerah otonom daerah otonom membutuhkan kekuatan dan kemmapuan untuk mengeksplorasi sumber daya keuangan mereka sendiri (Jauhar, 2016).

Pengelolaan finansial daerah dilaksanakan secara baik serta optimal sejalan terhadap aturan yang diberlakukan,kinerja keuangan pemerintah itu sendiri. Maka kinerja dapat diartikan sebagai penjelasan tentang pencapaian suatu pelaksanaan/program, serta kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi dalam organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah berarti suatu pedoman ataupun indikator yang bisa dipakaisuatu daerah dalam menentukan apakah suatu daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah penggunaan analisis rasio keuangan APBD, yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Menurut Ofasari (2018), kinerja keuangan dikatakan efisien apabila diperoleh nilai kurang dari 100%, efisiensi berimbang berada pada persentase 100% dan apabila lebih dari 100% dikatakan tidak efisien.

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara masih jauh dari kata efisien, dilihat dari masih banyak Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara yang kinerja keuangannya memiliki nilai rasio efisiensi. Yang lebih dari 100 %. Pada tahun 2018 hanya 12 daerah dari total keseluruhan 30 daerah yang memiliki kinerja keuangan yang dapat dikatakan efisien, begitu juga pada tahun 2019 hanya 19 daerah saja yang kinerja keuangannya efisien bahkan pada tahun 2020 memiliki penurunan yang sangat signifikan dimana hanya 11 daerah saja yang kinerja keuangannya efisien, disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi suatu kebijakan pembatasan segala kegiatan. Oleh karena itu, tingkat biaya operasional lebih tinggi dari pada realisasi pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengelola keuangan daerah secara efisien dan optimal. Melansir berita dari *medanbisnisdaily.com* (24/06/2021) menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumut 2020.

kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 70 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil survei BPK RI baru. Sementara itu, tingkat pencapaian dana untuk hasil perpajakan sekadar 81,28% dan lain-lain pendapatan yang sah hanyalah 65,23%. Kemerosotan perekonomian pada Sumut yang kala itu terdapat 1,07% dan juga banyak terlebih lagi banyak pejabat yang mempunyai status plt yang berdasarkan fraksi ini menciptakan kinerja kurang optimal

Berikut ini disajikan data PAD tahun 2017-2021 Provinsi Sumatera Utara yang dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2017-2021
(Ribu Rupiah)

| Kab/Kota | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nias utara | 17.985.375.513 | 20.500.044.370 | 24.428.556.167 | 18.928.243.086 | 23.038.097.980 |
| Pakpak Bharat | 12.628.544.765 | 11.081.576.948 | 17.908.271.473 | 12.328.006.465 | 15.630.662.490 |
| Nias Selatan | 31.387.619.686 | 28.794.296.952 | 52.942.803.426 | 27.973.933.154 | 40.081.266.042 |
| Nias | 18.210.070.415 | 17.438.886.227 | 28.298.373.042 | 16.260.913.654 | 21.377.094.662 |
| Humbang Hasundutan | 27.655.680.827 | 25.670.763.855 | 49.104.795.741 | 25.411.707.455 | 34.097.981.269 |
| Padang Lawas Utara | 33.830.116.376 | 30.104.797.075 | 57.722.312.744 | 38.062.860.595 | 42.463.495.932 |
| Sibolga | 16.685.741.473 | 14.016.565.466 | 24.928.213.906 | 18.175.748.730 | 19.418.510.710 |
| Nias Barat | 17.984.375.513 | 9.221.809.197 | 13.797.833.407 | 14.562.779.022 | 18.608.685.304 |
| Dairi | 36.988.183.798 | 27.445.689.653 | 53.406.451.415 | 31.894.439.511 | 37.799.489.717 |
| Tanjungbalai | 28.522.113.142 | 22.477.396.191 | 38.254.365.191 | 23.418.237.738 | 27.193.535 |
| Padang Lawas | 46.509.729.525 | 47.455.308.607 | 52.067.312.090 | 44.055.621.274 | 46.759.858.387 |
| Toba | 1.144.993.009.515 | 52.298.960.803 | 68.049.526.605 | 57.403.162.933 | 75.305.397.700 |
| Samosir | 17.466.397.852 | 16.488.855.383 | 34.467.816.977 | 22.250.326.996 | 25.966.743.415 |
| Gunung sitoli | 29.327.708.924 | 21.770.978.924 | 22.977.582.253 | 19.712.179.362 | 23.880.131.182 |
| Padang sidimpuan | 30.207.244.372 | 21.464.762.056 | 40.097.499.035 | 27.081.293.159 | 30.896.267.070 |
| Tapanuli Tengah | 36.361.263.371 | 31.565.178.650 | 59.916.817.288 | 34.020.496.422 | 45.039.314.836 |
| Mandailing Natal | 52.078.140.714 | 43.231.200.894 | 93.819.256.136 | 41.338.635.806 | 59.368.009.897 |
| Labuhanbatu Utara | 42.344.984.709 | 32.453.112.072 | 60.756.639.117 | 37.526.461.431 | 42.463.495.932 |
| Tebing Tinggi | 31.489.305.247 | 25.446.169.612 | 41.498.879.840 | 29.049.668.055 | 38.271.336.055 |
| Batubara | 48.795.332.990 | 39.773.243.830 | 79.412.313.382 | 48.871.521.540 | 57.105.607.229 |
| Binjai | 43.883.166.054 | 32.725.902.256 | 51.763.748.145 | 32.158.873.195 | 39.447.097.337 |
| Asahan | 84.865.578.235 | 64.522.426.859 | 125.680.261.926 | 83.668.369.894 | 103.080.125.795 |
| Pematangsiantar | 36.563.396.152 | 25.124.008.935 | 49.201.429.251 | 36.481.521.540 | 43.802.071.380 |
| Karo | 54.730.872.785 | 4.440.538.298 | 86.674.699.987 | 39.957.933.084 | 60.730.094.819 |
| Labuhanbatu | 68.005.520.492 | 48.231.200.894 | 93.047.431.035 | 63.009.442.964 | 71.064.485.805 |
| Langkat | 96.546.469.910 | 75.039.416.828 | 141.740.398.520 | 72.886.818.526 | 102.896.867.167 |
| Serdang Bedagai | 64.262.743.166 | 49.647.737.139 | 89.008.549.520 | 63.106.133.816 | 72.694.379.819 |
| Simalungun | 87.534.872.359 | 59.449.597.116 | 103.617.351.938 | 70.856.000.377 | 103.183.786.479 |
| Deli Serdang | 185.516.772.583 | 163.310.060.454 | 280.609.232.940 | 155.020.668.328 | 223.994.821.770 |
| Medan | 546.539.142.774 | 389.737.232.498 | 1.246.649.473.008 | 414.168.796.427 | 917.593.972.448 |

Sumber: BPK Sumatera Utara Tahun 2017 Sampai 2021

Suatu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan Pemda adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD bisa dijadikan menjadi indikator untuk menilai tingkat kinerja dan kemandirian suatu wilayah pada saat pengelolaan keuangan daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah maka akan semakin besar peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterahkan masyarakat (Mamuka, Rorong, & Sumual, 2019). Selain PAD, salah satu yang dapat dijadikan pemerintah menjadi infrastruktur untuk peningkatan perekonomian suatu daerah adalah penggunaan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum sebagai dana yang bertujuan guna pemerataan finansial atau keuangan antardaerah dan digunakan dalam mendanai keperluan pembelanjaan pemerintah daerah yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Pendanaan tersebut berasal melalui penerimaan APBD yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan finansial antardaerah terkait dengan pelaksanaan desentralisasi dan alokasi dana untuk kebutuhan daerah (Sari & Halmawati, 2021). PP No. 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa belanja modal adalah belanja yang kegunaannya melebihi 1 tahun anggaran yang ditentukan serta juga untuk membantu untuk meningkatkan aset daerah atau kekayaan yang lalu akan memberi peningkatan belanja rutin. Misalnya, sebagai beban pemeliharaan dalam kelompok belanja administrasi umum. Aset tetap pemerintah daerah yang dihasilkan dari belanja modal adalah infrastruktur, peralatan, dan harta berwujud lainnya. Pengelolaan belanja yang baik membuat value for money yang baik dan memungkinkan evaluasi yang lebih.

Kinerja keuangan pemerintah daerah baik (Nauw & Riharjo, 2021). Riset ini dilaksanakan supaya melaksanakan uji beserta analisis pengaruhnya PAD kepada Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Utara dan guna menguji dan menganalisis pengaruhnya Belanja

Modal kepada Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Utara

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus *et al.*, (2021) dengan Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Hasilnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Joice *et al.*, (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Berti *et al.*, (2021) juga menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muntu *et al.*, (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran berbasis kinerja (X1) Belanja Modal, (Y) Kinerja Keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Belanja Modal, berpengaruh positif terhadap kinerja Keuangan

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sari *et al.*, (2021) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum(X2), Belanja Daerah(X3), Kinerja Keuangan (Y), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum(X2), Belanja Daerah(X3), Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan(Y), Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah(X1), Dana Alokasi Umum(X2), Belanja Daerah (X3), Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Penelitian Sari *et al.*, (2021) dengan lebih memfokuskan Pada belanja Modal. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu: Pertama, Variabel penelitian menggunakan Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, dan Kinerja Keuangan, sedangkan penelitian ini

menggunakan Variabel yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Dan kinerja keuangan. Kedua, Objek Penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Sedangkan Penelitian ini Dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu tentang **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal secara parsial Terhadap Kinerja Keuangan?
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal secara simultan Terhadap Kinerja Keuangan?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar penelitian ini terfokus pada pembahasan yang telah ditentukan sehingga tidak meluas dan menyimpang. Dengan memperhatikan batasan masalah tersebut, analisis dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2021 di masa depan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum, Belanja Modal Secara parsial.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DanaAlokasi Umum, Belanja Modal Secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas dapat memberikan manfaat penelitian sebagaiberikut:

1. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Dearah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Sisa LebihPembiayaan Anggaran, dan Pinjaman Daerah terhadap Kinerja Keuanganpada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan jurusan akuntansi program studi akuntansisektor publik.